Journal Homapage: https://journal.manarulilmi.org/index.php/uang



Journal of Fiscal and Monetary Studies



Vol. 1 No. 2 (2025) pp. x - x

KONSEP KEBIJAKAN MONETER PRESPEKTIF AL - MARQIZI

Misba Romadona Tanjung^{1*}, Allans Prima Aulia², Amaliya Zahara³

*Korespondensi:

Email:

donatanjung0211@gmail.com

Afiliasi Penulis :

1,3Universitas Islam Negri Sejch M.Djamil Djambek Bukittinggi ²Universitas Fort De Kock Bukittinggi

Riwayat Artikel :

Penyerahan: 11 Februari 2025 : 26 April 2025 Revisi Diterima : 16 Mei 2025 Diterbitkan: 29 Mei 2025

Kata Kunci ·

Al-Magrizi, Kebijakan Moneter. Inflasi, Ekonomi Islam, Stabilitas Ekonomi.

Kevword:

Al-Maqrizi, Monetary Policy, Inflation, Islamic Economics, Economic Stability.

Kebijakan moneter merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Dalam pemikiran ekonomi Islam, Al-Magrizi memberikan kontribusi signifikan terkait kebijakan moneter, khususnya dalam menganalisis inflasi dan dampaknya terhadap perekonomian. Al-Magrizi membedakan inflasi menjadi dua jenis, yaitu inflasi alamiah akibat faktor eksternal seperti bencana alam dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia, seperti kebijakan moneter yang buruk, korupsi, serta peredaran uang berkualitas rendah. Ia juga menekankan pentingnya penggunaan mata uang berbasis emas dan perak untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta menyoroti dampak negatif dari pencetakan uang dalam jumlah berlebihan tanpa dukungan nilai intrinsik. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk menganalisis pemikiran Al-Maqrizi dan relevansinya terhadap kebijakan moneter modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Al-Magrizi masih relevan dalam konteks ekonomi saat ini, terutama dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi serta pentingnya kebijakan moneter yang stabil dan berkeadilan. Dengan demikian, kajian ini memberikan wawasan baru dalam mengevaluasi kebijakan moneter berdasarkan prinsip ekonomi Islam yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Monetary policy is an important instrument in maintaining the economic stability of a country. In Islamic economic thought, Al-Magrizi made significant contributions related to monetary policy, particularly in analyzing inflation and its impact on the economy. Al-Maqrizi distinguished inflation into two types, namely natural inflation due to external factors such as natural disasters and inflation caused by human error, such as poor monetary policy, corruption, and circulation of lowquality money. He also emphasized the importance of using gold and silver-based currencies to maintain economic stability, and highlighted the negative impact of printing excessive amounts of money without the support of intrinsic value. This study uses a qualitative method with a literature study approach to analyze Al-Magrizi's thoughts and their relevance to modern monetary policy. The results show that Al-Maqrizi's thoughts are still relevant in the current economic context, especially in understanding the factors that affect inflation and the importance of a stable and equitable monetary policy. Thus, this study provides new insights in evaluating monetary policy based on Islamic economic principles that are more oriented towards the welfare of society.

PENDAHULUAN

Kebijakan moneter merupakan instrumen penting dalam mengelola perekonomian suatu negara. Melalui pengendalian jumlah uang yang beredar, pengaturan suku bunga, serta stabilisasi nilai tukar, kebijakan ini bertujuan untuk

menjaga keseimbangan ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, kebijakan moneter sering kali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, serta krisis keuangan internasional dapat berdampak pada kestabilan moneter suatu negara. Sementara itu, faktor internal seperti kebijakan fiskal yang tidak efektif, tingginya tingkat korupsi, serta kurangnya koordinasi antara sektor moneter dan sektor riil juga menjadi kendala dalam penerapan kebijakan moneter yang optimal (Rosihana et al., 2024).

Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, salah satu tokoh yang memberikan kontribusi besar dalam kajian moneter adalah Al Maqrizi. Sebagai seorang sejarawan dan ekonom Muslim yang hidup pada masa Dinasti Mamluk, Al Maqrizi menaruh perhatian besar terhadap berbagai permasalahan ekonomi yang terjadi di Mesir pada zamannya. Ia mengamati bagaimana kebijakan moneter yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, memperburuk kondisi sosial masyarakat, serta menciptakan ketimpangan ekonomi yang semakin tajam. Dengan pendekatan historisnya, Al Maqrizi menganalisis penyebab inflasi dan dampaknya terhadap perekonomian.

Salah satu konsep penting yang dikemukakan oleh Al Maqrizi adalah pembagian inflasi menjadi dua jenis, yaitu inflasi alamiah dan inflasi akibat kesalahan manusia. Inflasi alamiah terjadi akibat faktor eksternal seperti bencana alam, kekeringan, atau peperangan yang menyebabkan berkurangnya pasokan barang dan jasa di pasar. Dalam kondisi ini, harga barang naik secara alami karena kelangkaan sumber daya. Sementara itu, inflasi akibat kesalahan manusia lebih banyak dipicu oleh kebijakan ekonomi yang tidak bijak, seperti administrasi pemerintahan yang buruk, tingginya tingkat korupsi, pajak yang membebani rakyat, serta peredaran mata uang berkualitas rendah dalam jumlah yang berlebihan. Menurut Al Maqrizi, inflasi yang disebabkan oleh faktor manusia ini jauh lebih berbahaya dan berpotensi menimbulkan krisis ekonomi yang berkepanjangan (Widianita et al., 2023).

Selain itu, Al Maqrizi juga menyoroti pentingnya penggunaan mata uang berbasis emas dan perak untuk menjaga stabilitas ekonomi. Menurutnya, sistem moneter yang sehat harus didasarkan pada uang yang memiliki nilai intrinsik, bukan hanya nilai nominal yang ditentukan oleh pemerintah. Ia mengkritik keras penggunaan fulus (mata uang berbahan tembaga dengan nilai rendah) dalam jumlah yang berlebihan karena dapat merusak daya beli masyarakat serta memicu inflasi yang tidak terkendali. Penggunaan fulus seharusnya hanya dibatasi untuk transaksi kecil, sedangkan transaksi dalam jumlah besar harus menggunakan mata uang berbasis emas dan perak agar tidak terjadi ketidakseimbangan dalam sistem ekonomi. Pemikiran ini menunjukkan bahwa Al Maqrizi sangat memahami pentingnya keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil dalam menciptakan stabilitas ekonomi (Widianita et al., 2024).

Pemikiran Al Maqrizi dalam bidang moneter tidak hanya relevan untuk zamannya, tetapi juga memiliki nilai yang dapat dijadikan refleksi dalam konteks ekonomi modern, termasuk di Indonesia. Saat ini, kebijakan moneter Indonesia masih menggunakan sistem uang fiat, di mana nilai uang tidak lagi didukung oleh emas atau perak, melainkan hanya berdasarkan kepercayaan terhadap otoritas moneter yang mengeluarkannya. Meskipun sistem ini memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan ekonomi, namun juga membawa risiko besar, seperti inflasi yang tidak terkendali, depresiasi nilai mata uang, serta ketidakstabilan ekonomi akibat spekulasi pasar.

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter utama memiliki peran sentral dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar serta menjaga stabilitas harga. Namun, tantangan besar masih terus dihadapi, terutama dalam menjaga keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. Fenomena inflasi yang terus terjadi, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta dampak dari kebijakan ekonomi global menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter nasional. Selain itu, permasalahan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang kurang efektif juga turut memberikan dampak terhadap kestabilan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, pemikiran Al Maqrizi dapat menjadi bahan kajian yang berharga untuk mengevaluasi kebijakan moneter modern. Dengan memahami bagaimana kebijakan moneter yang buruk dapat menyebabkan inflasi dan ketidakstabilan ekonomi, kita dapat mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan untuk diterapkan dalam perekonomian saat ini. Salah satu pelajaran penting dari pemikiran Al Magrizi adalah bahwa kebijakan moneter tidak dapat dipisahkan dari

faktor sosial dan politik. Stabilitas ekonomi tidak hanya bergantung pada pengaturan jumlah uang yang beredar, tetapi juga pada kebijakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep kebijakan moneter menurut Al Maqrizi, menelaah relevansinya dengan kondisi ekonomi saat ini, serta mengeksplorasi kemungkinan penerapan prinsip-prinsipnya dalam sistem ekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan. Dengan menggali kembali pemikiran ekonom Muslim klasik seperti Al Maqrizi, kita dapat memperoleh perspektif baru dalam memahami tantangan ekonomi modern serta mencari solusi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Athoillah, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis pemikiran Al Maqrizi mengenai kebijakan moneter dan relevansinya dalam konteks ekonomi modern, khususnya di Indonesia. Studi ini dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, baik dari sumber primer seperti karya Al Maqrizi Ighatsah al Ummah bi Kasyf al Ghummah, maupun sumber sekunder yang mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu yang membahas konsep kebijakan moneter dalam ekonomi Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya memahami konsep kebijakan moneter yang dikemukakan oleh Al Maqrizi berdasarkan konteks zamannya, lalu membandingkannya dengan teori-teori ekonomi modern serta kebijakan moneter yang diterapkan di Indonesia saat ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Dokumen dimana menganalisis berbagai literatur yang membahas pemikiran Al Maqrizi, teori kebijakan moneter, serta implementasi kebijakan moneter di Indonesia. Lalu analisis Komparatif dengan membandingkan konsep kebijakan moneter menurut Al Maqrizi dengan kebijakan moneter modern, khususnya yang diterapkan di Indonesia. Analisis Konseptual, menelaah konsep-konsep fundamental dalam pemikiran Al Maqrizi mengenai inflasi, stabilitas mata uang, serta peran pemerintah dalam kebijakan moneter.

Teknik Analisis Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan cara Deskripsi atau menyajikan pemikiran Al Maqrizi tentang kebijakan moneter secara sistematis berdasarkan literatur yang tersedia. Dan Interpretasi yakni menafsirkan dan memahami konsepkonsep yang dikemukakan oleh Al Maqrizi dalam konteks ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN Biografi Al Maqrizi

Al-Maqrizi merupakan seorang sejarawan dan cendekiawan Muslim terkemuka, lahir dengan nama lengkap Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Qadir Al-Husaini pada tahun 766H (1364-1365 M) di Barjuwan, Kairo. Keluarganya berasal dari Maqarizah, sebuah desa di kota Ba'labak, dan karena itulah dia lebih dikenal dengan nama Al-Maqrizi. Kondisi ekonomi yang lemah dari ayahnya menyebabkan dia dibesarkan di bawah tanggungan kakeknya dari pihak ibu, Hanafi ibnu Sa'igh, yang merupakan pengikut mazhab Hanafi. Al-Maqrizi muda memperoleh pendidikan yang didasarkan pada mazhab ini. Setelah kakeknya meninggal pada tahun 786 H (1384 M), Al-Maqrizi beralih ke mazhab Syafi'i, namun dalam perkembangan pemikirannya, dia cenderung ke arah mazhab Dzahiri.8 Selain itu, Al-Maqrizi juga dikenal sebagai seorang penulis yang sangat produktif dalam berbagai bidang ilmu, terutama dalam menulis sejarah Islam. Dia telah menciptakan lebih dari seratus karya tulis, baik dalam bentuk buku kecil maupun besar. Buku-buku kecilnya memiliki ciri khas tersendiri dan membahas berbagai macam ilmu yang tidak hanya terbatas pada sejarah.

Al-Syayyal mengelompokkan karya-karya kecilnya menjadi empat kategori. Pertama, ada buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum, seperti "Al-Niza" wa Al-Takhshum fi ma baina Bani Umayyah wa Bani Hasyim". Kedua, ada buku yang merangkum sejarah dari beberapa penjuru Dunia Islam yang belum banyak dibahas oleh sejarawan lain, seperti "Al-Imam bi Akhbar Man bi Ardh Al Habasyah min Muluk Al-Islam". Ketiga, ada buku yang menguraikan biografi singkat para raja, seperti "Tarajim Muluk Al-Gharb" dan "Al-Zahab Al-Masbuk bi Dzikr Man bi Hajja min Al-Khulafa wa Al-Muluk". Keempat, ada buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek sosial dan ekonomi di Dunia Islam secara umum, dan di Mesir secara khusus, seperti "Syudzur Al'Uqud fi Dzikir Al-Nuqud", "Al-

Akhyal wa Al-Auzan Al-Syar''iyyah", "Risalah fi Al-Nuqud Islamiyyah", dan "Ighatsah Al Ummah bi Kasyfil Gummah".

Sementara itu, terhadap karya-karya Al-Maqrizi yang berbentuk buku besar, *Al Syayyal* membaginya menjadi tiga kategori. Pertama, ada buku yang membahas tentang sejarah dunia, seperti "*Khabar "an AlBasyr*". Kedua, ada buku yang menjelaskan sejarah Islam umum, seperti "*Ad-durar Al-Mudh"iyah fi Tarikh Al-Daulah Al-Islamiyah*". Ketiga, ada buku yang menguraikan sejarah Mesir pada masa Islam, seperti "*Al-Muwa"izh wa Al I"tibar bi Dzikr Al-Immah Al-Fahimiyyin Al-Khulafa*", dan "*Al-Suluk li Ma"rifah Duwal Al-Muluk*" inovatif dalam dunia Islam. Latar belakang kehidupan Al-Maqrizi yang bukan seorang sufi atau filusuf dan relatif didominasi oleh aktivitasnya sebagai sejarawan muslim sangat mempengaruhi corak pemikirannya tentang ekonomi. Ia senantiasa melihat persoalan dengan flashback dan mencoba memotret apa adanya mengenai fenomena ekonomi suatu negara dengan memfokuskan perhatiannya pada beberapa hal yang mempengaruhi naik turunnya suatu pemerintahan. Hal ini berarti bahwa pemikiran-pemikiran ekonomi Al Maqrizi cenderung positif, suatu hal yang unik dan menarik pada fase kedua yang notabene didominasi oleh pemikiran yang normatif.

Pada masa hidupnya, Al-Maqrizi dikenal sebagai seorang mengeritik keras kebijakan-kebijakan moneter yang diterapkan pemerintahan Bani Mamluk Burji. Selain itu, dengan berbekal pengalaman yang memadai sebagai *muhtasib* (pengawas pasar), Al Maqrizi membahas permasalahan inflasi dan peranan uang di dalamnya, sebuah pembahasan yang sangat menakjubkan di masa itu karena mengkorelasikan dua hal yang sangat jarang dilakukan oleh para pemikir muslim maupun Barat. Dalam karyanya tersebut, Al-Maqrizi ingin membuktikan bahawa inflasi yang terjadi pada periode 806-808 H adalah berbeda dengan inflasi yang terjadi pada periode-periode sebelumnya sepanjang sejarah Mesir. Dengan pengalaman yang memadai sebagai *muhtasib* (pengawas pasar), Al-Maqrizi mengangkat permasalahan inflasi dan peran uang di dalamnya. Hal ini sangat menonjol karena pada masa itu, sangat jarang para pemikir, baik dari kalangan Muslim maupun Barat, mengkorelasikan kedua hal tersebut.

Dalam karyanya, Al-Maqrizi bertujuan untuk membuktikan bahwa inflasi yang terjadi pada periode 806-808 H berbeda dengan inflasi pada periode-periode

sebelumnya sepanjang sejarah Mesir. Diantara karya karya yang ditulis Al Maqrizi, dari sekian banyak karya yang dihasilkan dari pemikiran Al Maqrizi, karya yang banyak menceritakan masalah ekonomi adalah kitab Ighathah al-Ummah bi-Khasf al-Ghummah, Shadhur al-'Uqud fi Dhikr al Nuqud dan Risalah fi al-Mawazin wa al-Makayil. Ini tidak berarti Al Makrizi berbicara ekonomi hanya dalam kitab kitab tersebut. Namun dalam kitab yang lainnya diantaranya; *Al-Suluk li Ma'rifah Duwal Al Muluk* dan *Al Mawaiz wa al I'tibar bi Dhikr wa Al Athar* banyak ditemukan pemikirannya (Tenri & Nurul, 2024).

Konsep Uang Menurut Al – Maqrizi

Al-Maqrizi menjelaskan bahwa konsep uang memiliki sejarah panjang dengan emas dan perak sebagai standar nilai yang sah dan diakui berdasarkan hukum, logika, serta tradisi, di mana dalam perkembangannya mata uang ini digunakan sebagai alat tukar utama sejak zaman pra-Islam hingga masa kejayaan peradaban Islam, ketika Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan melakukan reformasi moneter dengan mencetak dinar dan dirham Islam yang berstandar khusus dalam bobot dan kadar logamnya agar stabil dan dapat diterima secara luas dalam berbagai transaksi perdagangan, sehingga sistem moneter berbasis emas dan perak menjadi fondasi utama dalam ekonomi Islam yang mendukung kestabilan harga serta keadilan dalam perdagangan dan sistem keuangan.

Al-Maqrizi menyoroti peran pemerintah dalam menentukan nilai mata uang yang pada awalnya bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi sering kali justru dipengaruhi oleh kepentingan politik, perubahan penguasa, serta kebijakan yang tidak konsisten dalam pencetakan dan pengedaran uang, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam sistem keuangan, sebagaimana terjadi pada masa pemerintahan Dinasti Mamluk ketika pencetakan uang dilakukan secara berlebihan demi kepentingan penguasa, yang mengakibatkan melemahnya daya beli masyarakat dan meningkatnya ketimpangan ekonomi, di mana pemerintah dengan mudah mengganti dan mencetak mata uang tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan volume produksi barang dan jasa, yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem keuangan yang ada dan menciptakan gejolak ekonomi yang semakin sulit dikendalikan.

Dalam pandangannya, salah satu dampak paling merusak dari kebijakan moneter yang tidak terkendali adalah inflasi yang muncul akibat penciptaan uang berkualitas rendah, seperti fulus yang diproduksi dalam jumlah besar tanpa keseimbangan dengan ketersediaan barang dan jasa, sehingga menyebabkan harga-harga melonjak dan daya beli masyarakat menurun drastis, sementara mereka yang memiliki mata uang berkualitas tinggi lebih memilih untuk menyimpannya daripada menggunakannya dalam transaksi, yang pada akhirnya semakin memperparah ketidakstabilan ekonomi dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem keuangan yang berlaku, di mana fenomena ini mirip dengan prinsip "*Gresham's Law*" dalam ekonomi modern yang menyatakan bahwa uang buruk akan mengusir uang baik dari peredaran, sehingga masyarakat hanya akan menggunakan mata uang dengan nilai rendah untuk transaksi sehari-hari sementara menyimpan emas dan perak sebagai bentuk lindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi.

Relevansi pemikiran Al-Magrizi dalam konteks modern dapat dilihat dalam bagaimana bank sentral saat ini, termasuk Bank Indonesia dan lembaga keuangan lainnya, menerapkan berbagai strategi seperti kebijakan inflasi yang ditargetkan (inflation targeting), pengendalian jumlah uang beredar, serta intervensi dalam nilai tukar mata uang untuk menjaga stabilitas ekonomi, yang sejalan dengan pandangan Al-Magrizi bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa pencetakan uang tidak dilakukan secara berlebihan, bahwa nilai mata uang tetap stabil, dan bahwa keseimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan ketersediaan barang serta jasa tetap terjaga agar inflasi dapat dikendalikan dan ekonomi dapat berfungsi secara optimal dalam jangka panjang, di mana kebijakan moneter modern yang diterapkan oleh bank sentral berfungsi untuk mengurangi dampak negatif inflasi dengan cara menyesuaikan suku bunga, mengontrol jumlah uang yang beredar, serta menjaga keseimbangan dalam sistem keuangan global guna memastikan bahwa ketidakstabilan yang pernah terjadi dalam sejarah, sebagaimana dicatat oleh Al-Maqrizi, dapat dicegah dan diminimalkan dalam perekonomian kontemporer yang semakin kompleks dan saling terhubung antarnegara (Mardianto et al., 2022).

Sebelum Islam, masyarakat Arab telah familiar terhadap jenis mata uang seperti Dinar dan Dirham, yang mereka dapatkan melalui perdagangan dengan berbagai bangsa di sekitar Jazirah Arab. Para pedagang membawa pulang Dinar emas Romawi dan Dirham perak Persia dari wilayah seperti Syam dan Irak, serta terkadang Dirham Himyar dari Yaman. Penggunaan mata uang asing ini berlangsung hingga runtuhnya Khilafah Utsmaniyah pasca-Perang Dunia I, yang membawa perubahan signifikan dalam politik dan ekonomi di wilayah Arab (Mulyani, 2020).

Uang dalam Islam secara resmi pertama kali diterbitkan dalam bentuk dinar dan dirham Islam pada masa Khalifah Bani Umayah, Abdul Malik bin Marwan. Pada saat itu dinar dan dirham dicetak sesuai dengan timbangan yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Sebelumnya Khalifah Umar pernah menerbitkan dirham, namun karena masih bercampur dengan unsur Persia maka tidak bisa disebut uang islam. Sampai saat ini, dinar dan dirham menjadi identik dengan Islam, padahal yang pertama menggunakan bukanlah umat Islam (Athoillah, 2024).

Pendapat kedua menyatakan bahwa uang adalah masalah terminologi. Maka segala sesuatu yang secara terminologi manusia dapat diterima dan diakui oleh mereka sebagai tolak ukur nilai, maka bisa disebut sebagai uang. Pandangan ini lebih dekat dengan definisi uang yang ada saat ini. Pendapat ini juga menyepakati substansi dari pernyataan Umar r.a sebagai berikut: "Aku ingin menjadikan dirham dari kulit unta" Lalu dikatakan kepadanya, "Jika demikian, unta akan habis" maka dia menahan diri. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin dapat uang dari materi apapun dan dengan bentuk apapun selama dapat merealisasikan kemaslahatan, dan tidak menyalahi aturan syariah. Berikut konsep yang terkait dengan uang menurut Al-Maqrizi(Selvia Lailatu Annizar, Marsya Ayu Saputry, Pitri Nurmawati, Risna Firnawati, 2025):

a. Implikasi Penciptaan Mata Uang yang Buruk

Al-Maqrizi menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Hal ini terlihat jelas ketika ia menguraikan situasi moneter pada tahun 569 H. Pada masa pemerintahan Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi ini, mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang sangat rendah dibandingkan dengan mata uang yang telah ada di peredaran. Dalam menghadapi kenyataan tersebut, masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan mata uang yang berkualitas baik dan meleburnya menjadi perhiasan serta melepaskan mata uang yang berkualitas buruk ke dalam peredaran. Akibatnya mata uang lama akan kembali ke peredaran.

b. Konsep Daya Beli Uang

Menurut Al-Maqrizi, percetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian terhadap hal ini, sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli riil uang mengalami penurunan (Widianita et al., 2024).

Pandangan Inflasi menurut Al-Maqrizi

Inflasi adalah fenomena ekonomi yang ditandai oleh kenaikan harga barang, komoditas, dan jasa selama periode tertentu. Hal ini dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Dengan kata lain, inflasi mengakibatkan daya beli uang menurun, sehingga jumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli barang atau jasa yang sama meningkat seiring waktu. Ini menciptakan tantangan ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi (Maghfiroh & Rinaldy, 2020).

Menurut Raharja dan Manurung, inflasi adalah gejala kenaikan harga barang barang yang bersifat umum dan berlangsung secara terus-menerus. Pendapat ini menekankan bahwa inflasi merupakan fenomena di mana harga-harga umum mengalami peningkatan secara berkelanjutan. Sementara menurut Sukirno, inflasi terjadi karena kenaikan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh permintaan pasar yang melebihi penawaran barang di pasar. Dengan kata lain, inflasi terjadi ketika terlalu banyak uang beredar yang mencari barang yang terlalu sedikit. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga secara umum dalam ekonomi, baik itu disebabkan oleh faktor permintaan yang berlebihan maupun faktor faktor lainnya (Dinda et al., 2023).

Dalam kitabnya "*Ighatsatul Ummah bi Kasyfil Ghummah*", Al-Maqrizi membahas berbagai bencana yang terjadi di Mesir pada masa pemerintahan para raja Mesir, yang kemudian berdampak pada kenaikan harga yang disebut inflasi. Al-Maqrizi menyatakan bahwa bencana-bencana tersebut sebenarnya telah terjadi sejak zaman Nabi Adam AS hingga saat itu. Ia merangkum berbagai bencana yang terjadi di Mesir. Menurut Al Maqrizi, awal mula terjadinya inflasi di Mesir tercatat pada zaman raja ke-17 dari para raja Mesir sebelum terjadinya bencana banjir pada masa Nabi Nuh AS yang disebut Afrusy bin Manawasy.

Al-Magrizi menyebutkan dalam kitab nya: Bermula inflasi terjadi di Mesir ialah pada zaman raja yang ke-17 dari raja-raja Mesir sebelum terjadinya bencana banjir yang terjadi pada zaman nabi Nuh As yang bernama Afrusy bin Manawasy. Al-Maqrizi menyebutkan dalam kitab yang artinya "dan adalah sebab terjadinya inflasi terangkatnya hujan (kemarau), dan sedikitnya sungai nil, maka hewan-hewan mandul". Oleh sebab itu, inflasi terjadi pada masa pemerintahan kerajaan Mustansir disebabkan oleh kemarau yang menyebabkan berkurangnya pasokan air sungai Nil, yang merupakan sumber kehidupan utama Mesir. Selain itu, binatang ternak juga mengalami kesulitan dalam melahirkan akibat mandul. Akibat dari kedua bencana ini adalah kelangkaan persediaan, yang kemudian mengakibatkan kenaikan harga secara umum.(Fatih Mubaidilla & Agama, 2022) Selanjutnya, inflasi juga terjadi pada masa pemerintahan Fir'an bin Mas'ur, raja ke-19 dari raja Mesir sebelum terjadinya bencana zaman Nabi Nuh AS. Al-Maqrizi menyebutkan hal ini dalam kitabnya, "Dan sebabnya adalah bahwasanya terjadinya kedzaliman dan kekacau balauan ataunya banyaknya fitnah sehingga tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menentangnya, maka tanduslah bumi dan rusaklah tanamtanaman, hal itu terjadi disebabkan oleh banjir" (Atok Syihabuddin, Bakhrul Huda, 2022).

Dengan mengungkapkan sejumlah fakta tentang bencana kelaparan yang terjadi di Mesir, Al-Maqrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan fenomena alam yang telah memengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia dari masa lampau hingga saat ini. Baginya, inflasi terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan yang berlangsung terus-menerus. Pada saat inflasi terjadi, persediaan barang dan jasa menjadi langka, sehingga konsumen terpaksa membayar lebih banyak uang untuk mendapatkan barang dan jasa yang sama karena kebutuhan mereka yang mendesak (Mulyani, 2020).

Selanjutnya, Al Maqrizi mendalami permasalahan inflasi dengan lebih detail. Ia mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya, yakni berdasarkan faktor alamiah dan faktor human *error*.

Inflasi Alamiah

Pengertian inflasi alamiah adalah inflasi yang terjadi secara alami, bukan disebabkan oleh penyimpangan penguasa negara. Peristiwa inflasi ini terjadi karena fenomena alam yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Contohnya adalah bencana

alam yang menyebabkan berbagai bahan makanan dan hasil bumi mengalami penurunan yang drastis, sehingga terjadi kelangkaan. Akibatnya, harga-harga melambung tinggi dan melebihi daya beli masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya yang dapat menyebabkan transaksi ekonomi mengalami kemacetan atau bahkan berhenti sama sekali.(R et al., 2024) Dampaknya, masyarakat dapat mengalami bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian. Untuk mengatasi bencana tersebut, pemerintah seringkali harus mengeluarkan sejumlah besar dana, yang dapat mengakibatkan penurunan drastis dalam perbendaharaan negara karena sumber pendapatan yang tidak cukup memadai. Akibatnya, pemerintah dapat mengalami defisit anggaran, dan negara secara keseluruhan, baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial, menjadi tidak stabil. Hal ini dapat menyebabkan kehancuran suatu pemerintahan.(Siregar & Masri, 2019)

Menurut Al-Maqrizi, walaupun bencana telah berlalu, namun kenaikan harga tetap berlangsung. Hal ini disebabkan oleh bencana yang terjadi sebelumnya yang menyebabkan aktivitas ekonomi terutama di sektor produksi menjadi terhambat. Ketika keadaan akan kembali normal, seperti pada persediaan barang-barang primer seperti benih padi, tetap tidak bertambah dan bahkan tetap langka, sementara permintaan akan meningkat secara signifikan. Hal ini menyebabkan kenaikan harga yang kemudian diikuti oleh kenaikan harga berbagai jenis barang dan jasa lainnya. Situasi ini memaksa pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan rakyat dan menanggulangi dampak bencana tersebut. Sebagai tanggapan, pemerintah kemudian mengeluarkan dana besar yang mengakibatkan pembendaharaan negara mengalami penurunan drastis atau defisit.(Romadhan et al., 2024)

Inflasi alamiah dapat dibagi berdasarkan penyebabnya, yakni:

Uang masuk dari luar negeri meningkat karena ekspor meningkat $(X\uparrow)$, sementara impor menurun $(M\downarrow)$, sehingga nilai net ekspor sangat besar dan menyebabkan naiknya permintaan agregat $(AD\uparrow)$. Keadaan seperti ini pernah terjadi pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab, di mana kafilah pedagang yang menjual barangnya di luar negeri membeli barang-barang dari luar negeri dengan nilai yang lebih rendah daripada nilai barang-barang yang mereka jual, sehingga mereka mendapat keuntungan. (Isnaini et al., 2024) Keuntungan berupa kelebihan uang

tersebut dibawa masuk ke Madinah, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat naik (AD↑).

Naiknya Permintaan Agregat akan menyebabkan kurva AD bergeser ke kanan dan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan (P↑). Kemudian, Umar ibn Khattab mengatasi masalah tersebut dengan melarang penduduk Madinah untuk membeli barang selama 2 hari berturut-turut. Akibatnya, Permintaan Agregat turun (AD↓) dan tingkat harga menjadi normal.(Azhar et al., 2024)

2) Dampak turunnya tingkat produksi (AS\$) dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti masa panceklik, perang, atau embargo. Sebagai contoh, pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab, terjadi masa panceklik yang mengakibatkan kelangkaan gandum. Dalam konteks kurva AS dalam model ekonomi, ini dapat diibaratkan sebagai pergeseran ke kiri (AS\$), yang berdampak pada kenaikan hargaharga (P\$). Untuk mengatasi permasalahan ini, Umar ibn Khattab melakukan impor gandum dari Mesir.(Novia, 2010) Tindakan ini meningkatkan Penawaran Agregat (AS) barang di pasar (AS\$), yang kemudian berdampak pada penurunan harga-harga (P\$) karena tersedianya lebih banyak pasokan gandum.

Inflasi Human Error

Inflasi terjadi dalam dua jenis fenomena sosial ekonomi. Pertama, terjadi pada masa Rasulullah dan khulafaur Rasyidin karena faktor alamiah seperti kekeringan dan pengangguran. Kedua, menurut Al-Maqrizi, mirip dengan penyebab krisis di Mesir, yaitu korupsi, administrasi pemerintahan yang buruk, pajak berlebihan yang membebani petani, dan sirkulasi mata uang fulus yang berlebihan. Pendekatan ini jauh lebih komprehensif daripada pandangan Milton Friedman, yang menganggap inflasi hanya sebagai fenomena moneter. Aji Prasetyo, "Peran Uang Dalam Sistem Moneter Islam," Majalah Ekonomi 22, no. 1 (2017): 104–10.

Inflasi yang disebabkan oleh human error merupakan inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum/30:41

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

Selain faktor alam, Al-Maqrizi mengungkapkan bahwa inflasi dapat disebabkan oleh kesalahan manusia (Iryanto et al., 2023). Ia mengidentifikasi tiga hal yang menyebabkan terjadinya inflasi jenis kedua ini, yaitu: korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang fulus.

1) Korupsi dan Administrasi yang Buruk (*Corruption and bad administration*)

Al-Maqrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintahan berdasarkan pemberian suap, bukan karena kapabilitas, akan menempatkan individu yang tidak memiliki kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat, baik di kalangan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Mereka bahkan bersedia mengorbankan seluruh harta mereka sebagai kompensasi untuk mendapatkan jabatan yang diinginkan serta memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai pejabat. Akibatnya, para pejabat pemerintahan tidak lagi bebas dari intervensi dan intrik dari para kroni istana. Mereka tidak hanya mungkin dipecat sewaktu-waktu, tetapi juga berisiko kekayaan mereka disita, bahkan dieksekusi.

Kondisi tersebut sangat mempengaruhi moral dan efisiensi administrasi sipil dan militer. Ketika berkuasa, para pejabat tersebut mulai menyalahgunakan kekuasaan untuk mencapai kepentingan pribadi, baik untuk memenuhi kewajiban finansialnya maupun untuk hidup mewah. Mereka berusaha mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin dengan cara apapun, tanpa memperdulikan etika dan keadilan. Penyebaran ketidakadilan oleh para pejabat ini telah membuat kondisi rakyat semakin memprihatinkan, sehingga mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman dan pekerjaan mereka. Akibatnya, terjadi penurunan drastis dalam jumlah penduduk dan tenaga kerja, serta hasil produksi, yang sangat berimplikasi terhadap penurunan penerimaan pajak dan pendapatan Negara.(Rahmat, 2016)

Untuk menghadapi situasi demikian, Al-Maqrizi menerapkan pendekatan agama dan akhlak. Menurutnya, para pejabat telah banyak melanggar ketentuan syariat Islam, dan akhlak yang mereka tunjukkan tidak sesuai dengan standar akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengembalikan akhlak dan moral para pejabat agar sesuai dengan ajaran Islam. Penerapan syariat Islam di Mesir harus ditegakkan dengan sungguh-sungguh, terutama dimulai dari para pejabat yang berperan penting dalam pemerintahan. Al Maqrizi percaya bahwa dengan memperbaiki akhlak dan moral para pejabat sesuai dengan ajaran Islam, situasi

ekonomi dan sosial di Mesir dapat membaik dan terwujud keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Nurul Inayah, 2022).

2) Pajak yang Berlebihan

Menurut Al-Maqrizi, dominasi para pejabat yang korup mentalitasnya dalam suatu pemerintahan menyebabkan pengeluaran negara meningkat secara drastis. Sebagai kompensasi, mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang sudah ada. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi para petani, yang merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat.

Pemilik tanah yang tertarik dengan hasil pajak yang menjanjikan cenderung melimpahkan beban pajak kepada para petani dengan meningkatkan biaya sewa tanah. Akibatnya, tekanan dari para pejabat dan pemilik tanah terhadap para petani menjadi lebih besar dan intensif. Frekuensi berbagai pajak, seperti untuk pemeliharaan bendungan dan pekerjaan serupa, semakin meningkat. Dampaknya, biaya-biaya yang harus ditanggung oleh petani untuk penggarapan tanah, penaburan benih, pemungutan hasil panen, dan sebagainya juga meningkat. Dengan kata lain, hasil panen padi yang dihasilkan dalam kondisi ini memerlukan biaya yang lebih besar, bahkan hingga melebihi kemampuan para petani. Hal ini menunjukkan bahwa petani mengalami kesulitan finansial yang signifikan akibat beban pajak yang diberlakukan oleh pemilik tanah dan tekanan dari para pejabat.(Fadilla, 2016)

Frekuensi pajak untuk pemeliharaan bendungan dan pekerjaan serupa semakin meningkat. Konsekuensinya, biaya untuk penggarapan tanah, penaburan benih, pemungutan hasil panen, dan sebagainya meningkat. Dengan kata lain, panen padi memerlukan biaya yang lebih besar hingga melebihi kemampuan para petani. Kenaikan harga-harga, terutama benih padi, hampir tidak mungkin mengalami penurunan karena sebagian besar benih padi dimiliki oleh para pejabat yang sangat ingin kaya. Roy Hasiru, Mohamad Fadhan Kunuti, and Febriyanita Y Baki, "Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah) 5, no. 1 (2024): 45–57. Akibatnya, para petani kehilangan motivasi untuk bekerja dan memproduksi. Mereka lebih memilih meninggalkan tempat tinggal dan pekerjaan mereka daripada hidup dalam penderitaan untuk kemudian menjadi pengembara di daerah pedalaman. Dengan demikian, terjadi penurunan tenaga kerja dan peningkatan

lahan tidur yang sangat mempengaruhi tingkat hasil produksi padi serta hasil bumi lainnya, yang pada akhirnya menyebabkan kelangkaan bahan makanan dan peningkatan harga-harga.(Firdaus, 2022)

Al-Maqrizi mengusulkan agar pemerintah mengembalikan besaran pajak sesuai dengan tarif yang berlaku sebelumnya. Dengan kembalinya tarif pajak yang normal, hal ini diharapkan dapat memberikan insentif bagi para petani dan meningkatkan produktivitas kerja mereka. Sebagai hasilnya, produksi pertanian, yang merupakan sektor kehidupan yang paling dominan di Mesir, dapat kembali normal dan meningkatkan produksi nasional terutama untuk bahan kebutuhan pokok. Ini dianggap sebagai langkah yang penting untuk mengurangi beban finansial petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian.(Saprida, Qodariah Barkah, 2021)

3) Peningkatan Sirkulasi Mata Uang

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pada awalnya mata uang fulus dicetak sebagai alat transaksi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari hari yang tidak signifikan, meskipun nilainya intrinsik jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya. Oleh karena itu, jumlah mata uang ini dalam peredaran sangat sedikit. Namun, ketika terjadi defisit anggaran sebagai akibat dari perilaku buruk para pejabat yang menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka, pemerintah akhirnya mencetak mata uang fulus secara besar-besaran.(Abdullah, 2011)

Ketika terjadi kekurangan pengeluaran karena tindakan buruk yang dilakukan oleh pihak berwenang yang menggunakan uang negara untuk kepentingan individu dan kelompoknya, otoritas publik membuat cakupan uang tunai yang sangat besar. Akibatnya, jumlah mata uang ini yang beredar menjadi sedikit. Ketika terjadi defisit anggaran karena perilaku buruk para pejabat yang menghabiskan uang negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, pemerintah melakukan pencetakan uang fulus secara besar-besaran.

Al-Maqrizi menegaskan bahwa kegiatan ini semakin meluas karena ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan besar dari pencetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi yang tinggi, sehingga menjadi tidak terkendali. Sebagai penguasa, pemerintah mengeluarkan peraturan yang memaksa masyarakat

untuk menggunakan mata uang tersebut. Jumlah fulus yang dimiliki masyarakat pun semakin besar dan sirkulasinya meningkat secara tajam, membuat fulus menjadi mata uang yang dominan. Keadaan ini mengakibatkan fulus menjadi standar nilai bagi sebagian besar barang dan jasa. Al-Maqrizi berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dengan strategi administrasi ini menghasilkan standar moneter yang berbeda. Dengan keuntungan besar yang diperoleh dari pencetakan fulus, pemerintah menghentikan pencetakan perak sebagai mata uang. Bahkan, sebagai implikasi dari gaya hidup para pejabat, sejumlah dirham yang dimiliki masyarakat dilebur menjadi perhiasan. Akibatnya, mata uang dirham mengalami kelangkaan dan menghilang dari peredaran.(Bachtiar et al., 2025)

Sementara itu, mata uang dinar masih tetap beredar meskipun hanya dimiliki oleh segelintir orang. Keadaan ini membuat uang tunai menjadi insentif utama bagi kebanyakan produk dari perusahaan. Namun, pengaturan mencetak uang tunai dalam jumlah yang sangat besar, menurut Al-Maqrizi, sangat mempengaruhi penurunan estimasi uang yang luar biasa. Akibatnya, uang tunai tidak lagi memiliki signifikansi pada saat ini dan mengakibatkan meningkatnya kekurangan pangan.(Ambok, 2013)

Al-Maqrizi menyatakan bahwa penggunaan fulus dalam muamalah (transaksi ekonomi) merupakan bid'ah yang tidak berdasarkan pada syariat Islam. Maka, beliau mengajukan solusi untuk mengembalikan harga-harga barang dan jasa menjadi seperti sebelum krisis. Mesir harus kembali menggunakan sistem moneter alami, di mana dinar dan dirham menjadi mata uang pokok, sedangkan fulus diterbitkan secara terbatas dan hanya untuk membeli barang-barang remeh. Al-Maqrizi menetapkan harga relatif bagi dinar, dirham, dan fulus dalam sistem ini, yang akan mengembalikan kestabilan nilai mata uang dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter. Dengan mengikuti prinsip prinsip syariah dalam sistem moneter, Al-Maqrizi berharap dapat mengatasi masalah ekonomi dan keuangan yang dihadapi Mesir pada saat itu (Zamilah, 2024).

KESIMPULAN

Pemikiran Al-Maqrizi mengenai kebijakan moneter memberikan wawasan yang mendalam terhadap fenomena inflasi dan stabilitas ekonomi. Ia membedakan inflasi menjadi dua jenis utama, yaitu inflasi alamiah yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, dan inflasi akibat kesalahan manusia yang dipicu oleh kebijakan

moneter yang tidak bijak, korupsi, serta peredaran mata uang berkualitas rendah. Salah satu solusi yang ditawarkan Al-Maqrizi untuk menjaga stabilitas ekonomi adalah penggunaan mata uang berbasis emas dan perak, karena memiliki nilai intrinsik yang dapat mencegah ketidakstabilan moneter.

Dalam konteks ekonomi modern, pemikiran Al-Maqrizi masih relevan, terutama dalam memahami dampak kebijakan moneter terhadap inflasi dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter yang tidak hati-hati dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi dan ketidakstabilan harga. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang dikemukakan Al-Maqrizi dapat menjadi bahan refleksi bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem ekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan. Studi ini menegaskan bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya bergantung pada regulasi moneter, tetapi juga pada tata kelola pemerintahan yang baik serta kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B. (2011). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (p. 454). CV Pustaka Setia. Ambok, P. (2013). Inflasi pada Fenomena Sosial Ekonomi Menurut Al-Maqrizi. *Kontekstualita*, 28(1), 147–173.
- Athoillah, M. A. (2024). *KEBIJAKAN MONETER DAN CAPITAL MARKET DALAM PERSPEKTIF*. 2(1), 48–60.
- Atok Syihabuddin, Bakhrul Huda, B. N. A. (2022). Politik Uang (Reunderstanding Inflasi dan Kurs dalam Ekonomi Islam). *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1), 99–111.
- Azhar, F. N., Sania, N. K., Ismail, M. M., & ... (2024). Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim Periode Menengah. *Jurnal Ilmiah* ..., *1*(3), 415–426.
- Bachtiar, A. R., Bagus, M., Valentino, A., Nurazizah, F. A., Dwi, I., Nur, L., Syarifah, N. S., Hidayati, A. N., Islam, U., Sayyid, N., Rahmatullah, A., Islam, E., Inflasi, P., & Inflasi, P. (2025). Inflasi Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 1–9.
- Dinda, M., Alrasyid, F., & Gunawan, S. (2023). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ahkam*, 2(2), 327–334. https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1145
- Eva Misfah Bayuni. (2012). *PEMIKIRAN AL MAQRIZI TENTANG UANG DAN INFLASI (KRITIK TERHADAP KEBIJAKAN UANG DAN INFLASI DI INDONESIA*).
- Fadilla. (2016). Pemikiran Ekonomi Al Maqrizi. *Economica: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 103.
- Fatih Mubaidilla, T., & Agama, I. A. M. (2022). *PENDEKATAN SOSIOLOGIS DALAM STUDI ISLAM*. *16*(1), 68–81.
- Firdaus, A. R. G. (2022). Inflasi: Telaah Pemikiran Ekonomi Islam Al-Maqrizi Dan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19. *Karaton: Jurnal Pembangunan Sumenep*, 1(2), 278–287.

- Hasiru, R., Kunuti, M. F., & Baki, F. Y. (2024). Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *MUTAWAZIN* (*Jurnal Ekonomi Syariah*), 5(1), 45–57. https://doi.org/10.54045/mutawazin.v5i1.1813
- Iryanto, M., Abubakar, A., & Inat, F. (2023). Konsep Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Al-Qur'an. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 7(2), 308. https://doi.org/10.29240/alquds.v7i1.5416
- Isnaini, N., Tsabit, A. M., Ifadiyah, N., Humairah, Thoyyibah, & Rois, M. (2024). The Relevance of Al-Maqrizi's Islamic Economic Thought in Indonesia. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 239–253.
- Maghfiroh, D., & Rinaldy, R. (2020). Analisis Inflasi Saat Ini Menurut Imam Al Maqrizi. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi, Dan Kewirausahaan*, 11(3), 102–109. https://doi.org/10.36418/covalue.v11i3.1270
- Mardianto, D., Wafia, N. U., Toyyibi, A. M., Lala, A. A. T., Radiansyah, A., Idayanti, R., Wibowo, F. W., & Sujono, R. I. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. Sada Kurnia Pustaka.
- Mulyani, R. (2020). Inflasi dan Cara Mengatasinya dalam Islam. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(2), 267–278. https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v1i2.47
- Novia, A. (2010). Kajian Intervensi Harga oleh Pemerintah dalam Pemikiran AlMaqrizi. *IAIN Imam Bonjol Padang*, 1–23.
- Nurul Inayah. (2022). Teori Inflasi: Studi Komparasi Pemikiran Al-Maqrizi (766-845 H/ 1364-1442M) Dan Keynes (1883–1946). *Mumtaz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 1–11. https://doi.org/10.55537/mumtaz.v2i01.534
- Prasetyo, A. (2017). Peran Uang dalam Sistem Moneter Islam. *Majalah Ekonomi*, *XXII*(1), 104–110.
- R, D. P. N., Nisa, Z. K., & Shahrani, D. S. (2024). *Melacak Akar Inflasi Di Indonesia Perspektif Al-Magrizi*. 2(1), 1–13.
- Rahmat, S. I. (2016). Ekonomi Islam. In *Yogyakarta: Lafal Indonesia*. UNG Press Gorontalo.
- Romadhan, R. A., Aghliyah, S. P., & Aurelia, R. (2024). Pemikiran Al-Maqrizi dan Keynesian Tentang Teori Perbandingan Inflasi Dalam Perspektif Islam dan Konvensional. *Trunojoyo.Ac.Id*, 5(2), 204–214.
- Rosihana, R. E., Simanjuntak, M., Wahyuni, S., Hidayat, F., Hastalona, D., Nainggolan, E., Januarty, W., Elmizan, G. H., Salmiah, S., & Mistriani, N. (2024). *Pengantar Ekonomi*. Yayasan Kita Menulis.
- Saprida, Qodariah Barkah, Z. F. U. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Kencana.
- Selvia Lailatu Annizar, Marsya Ayu Saputry, Pitri Nurmawati, Risna Firnawati, A. N. H. (2025). INFLASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN: MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM. *Jurnal Pedia*, 7(1), 12–16.
- Siregar, S., & Masri, T. (2019). Teori Inflasi Menurut Al-Maqrizi. *Mudharabah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 60–67.
- Tenri, A., & Nurul, G. (2024). Eksplorasi Pemikiran Ekonomi Islam Al-Maqrizi terhadap Konsep Uang dan Inflasi. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 20–38.
- Widianita, R., Hidayat, F., & Hidayatullah, A. K. (2024). Money Supply and Inflation in Indonesia: An Analysis of al-Maqrizi's Thought. *JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 9(1), 82–89.

- Widianita, R., Ilhamiwati, M., & Hidayat, F. (2023). Analisis Permintaan Uang Perspektif Islam di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 1–18.
- Zamilah, A. (2024). Pemikiran Al-Maqrizi: Inflasi dan Kondisi Perekonomian Indonesia. *Finance: Journal of Accounting and Finance*, 1(2), 47–63. https://doi.org/10.55210/hm08ks40

Copyright holder:

Misba Romadona Tanjung et al (2025)

First publication right:

UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies

This article is licensed under:

